

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan mempunyai peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat, terlibat dalam proses pembangunan serta pemberdayaan sumber daya manusia. Tidak hanya sebatas pada ranah kosmetik saja, perempuan juga dapat mengembangkan potensi dan memiliki kesempatan untuk ikut andil berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan, namun pemahaman ini masih sulit untuk diterima di beberapa kelompok masyarakat tertentu, yang berdampak pada ruang gerak perempuan (Sukmawani et al., 2023: 2692).

Terlepas dari hal itu perempuan di Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, upaya pemerintah untuk mengatasi dan memberikan jaminan serta kesempatan pada perempuan untuk bisa terjun ke sektor pekerjaan pada umumnya. Secara khusus pemerintah mencantumkan dalam UU No, 13 Tahun 2003 pasal 5 tentang ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Ketetapan ini sudah jelas bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan di berbagai sektor pekerjaan, peraturan tersebut memperlihatkan jika negara mendorong prinsip keadilan dan mendorong kesetaraan gender dalam kesempatan bekerja.

Saat ini realitas yang terjadi belum sesuai dengan peraturan yang ada, kesenjangan tetap terjadi terutama dalam konteks akses perempuan untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan peranan

perempuan di berbagai sektor kehidupan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami keterbatasan dalam akses dan kesempatan kerja, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus dalam proses pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pesisir Selatan, angkatan kerja mencapai sekitar 65 persen dari penduduk usia kerja. Dari total angkatan kerja tersebut, terdapat 159.623 laki-laki dan 96.801 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam angkatan kerja masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selain itu, secara umum Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan juga lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam partisipasi kerja berdasarkan gender. Berdasarkan data tersebut menunjukkan perlunya upaya yang dapat meningkatkan kapasitas dan keberdayaan perempuan dalam dunia kerja.

Gambar 1.1 Tabel Angkatan Kerja dan TPAK

Tabel 3.3 Angkatan kerja dan TPAK menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin				Jumlah	TPAK
	Laki-Laki		Perempuan			
	Angkatan Kerja	TPAK	Angkatan Kerja	TPAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak/ Belum Tamat SD	21.456	79,49	14.557	42,86	36.013	59,08
Sekolah Dasar	30.904	82,92	18.197	50,64	49.101	67,08
Sekolah Menengah Pertama	34.996	72,51	13.794	32,69	48.790	53,94
Sekolah Menengah Atas (Umum)	42.396	83,42	19.386	43,14	61.782	64,51
Sekolah Menengah Atas (Kejuruan)	18.850	85,83	5.718	58,02	24.568	77,21
Diploma I/II/III	1.214	69,69	4.148	69,86	5.362	69,82
Universitas	9.807	96,44	21.001	85,91	30.808	89,00
Total	159.623	80,94	96.801	49,07	256.424	65,00

Sumber: Sakernas Agustus 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Dalam Laporan Kabupaten

Pesisir Selatan 2023

Pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik (Rifai et al., 2022: 71). Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan kekuatan pada satu pihak yang lemah, dengan memberi wewenang kepada individu untuk mengatur potensi yang dimilikinya (Margayaningsih, 2018: 77-78). Pemberdayaan sebagai proses merupakan kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan, dalam proses inilah masyarakat berperan dan terlibat secara aktif, serta memberikan kepercayaan dan meningkatkan potensi masyarakat.

Potensi yang dikembangkan dalam proses pemberdayaan bukan menekankan pada hasil namun pada proses itu sendiri yang dijalankan oleh agen pemberdayaan. Faktor yang mendukung berhasilnya proses pemberdayaan terletak pada agen pemberdayaan yang mampu berkompetensi sesuai perkembangan zaman ini (Hendra, 2017: 194). Menurut Totok dan Poerwoko pemberdayaan sebagai proses meliputi, proses pembelajaran, proses penguatan kapasitas, dan proses perubahan sosial. Sebagai proses pembelajaran, pemberdayaan bertujuan untuk membentuk proses belajar yang mandiri dan selalu melakukan perubahan (Mardikanto & Soebiato, 2019: 68).

Saat ingin melakukan kegiatan pemberdayaan tentunya perlu melalui beberapa tahapan agar proses berlangsungnya kegiatan pemberdayaan berjalan dengan sistematis, tahapan-tahapan disini dijadikan sebagai peta jalan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tahapan-tahapan dalam pemberdayaan menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebito (Mardikanto & Soebiato, 2019:

127-129) meliputi proses penetapan dan pengenalan wilayah kerja, sosialisasi kegiatan, penyadaran masyarakat, pengorganisasian masyarakat, pelaksanaan kegiatan pelatihan, advokasi kebijakan dan politasi.

Dalam hal ini diperlukan pemberdayaan perempuan, sebagai landasan dan dorongan untuk memperluas partisipasi peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan, serta mendorong kesetaraan gender di masyarakat.

Pemberdayaan perempuan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1970-an, namun dengan adanya program ini belum sepenuhnya daerah perkotaan dan perdesaan memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas, dan kualitas kehidupan perempuan (Asnawan et al., 2022: 193). Sebagai upaya pemberdayaan perempuan tentunya memperluas ruang gerak perempuan dalam menjalankan kehidupannya untuk meningkatkan kualitas serta mampu berdaya saing, dan berpartisipasi ke dunia kerja.

Salah satu upaya pemberdayaan perempuan dalam partisipasi dunia kerja untuk memperluas ruang gerak perempuan, melalui program pelatihan, pelatihan merupakan proses pembelajaran. Pelatihan merupakan kegiatan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh individu (Suratman & Riyant, 2020: 791). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016: 502) pelatihan merupakan pendidikan untuk memperoleh sebuah kemahiran.

Bentuk pelatihan yang mendukung keterampilan praktis perempuan dalam upaya pemberdayaan perempuan sudah banyak dilakukan, salah satunya melalui pelatihan keterampilan tata rias pengantin, meliputi tata rias wajah dan busana pengantin. Tata rias pengantin merupakan kegiatan tata rias wajah pada pengantin

untuk menonjolkan kelebihan yang ada pada pengantin, dan menutupi bagian yang kurang sempurna (Hutami et al., 2023: 161). Saat acara pernikahan biasanya mempelai dirias oleh orang yang mempunyai keterampilan di bidang tata rias ini.

Dalam pemakaian tata rias ini akan berkaitan dengan keterampilan bagaimana menggunakan dan mengaplikasikan kosmetik ke wajah untuk menonjolkan titik tertentu, selain itu dalam tata rias pengantin memiliki tema serta identik dengan penggunaan nilai-nilai budaya. Dalam tata rias pengantin teknik seni sangat dibutuhkan, tentunya tidak semua orang memiliki keterampilan dalam seni ini.

Tata rias pengantin termasuk dalam bagian bidang jasa, untuk saat ini ditengah maraknya trend kecantikan dan sudah menjadi kebutuhan masyarakat terus mengalami peningkatan. Fenomena ini menjadi peluang dalam sektor pekerjaan dan meningkatkan partisipasi perempuan, menjadi prospek kerja yang menjanjikan dan membuka peluang bagi pemerintah untuk melibatkan partisipasi perempuan melalui pelatihan sebagai modal untuk mengasah keterampilan.

Dalam pemakaian tata rias ini akan berkaitan dengan keterampilan bagaimana menggunakan dan mengaplikasikan kosmetik ke wajah untuk menonjolkan titik tertentu. Namun, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, aktivitas merias ini sebenarnya menyimpan esensi yang jauh lebih mendalam dari sekadar urusan dandan atau estetika visual semata.

Tokoh perempuan Indonesia yang menekuni dunia tata rias, Martha Tilaar, tokoh perempuan Indonesia yang berkecimpung di dunia tata rias, menyebutkan bahwa keterampilan merias bukan sekadar urusan penampilan, melainkan juga

dapat membantu perempuan membangun kepercayaan diri, membentuk citra diri yang lebih positif, dan memperkuat posisi mereka dalam kehidupan sosial (Putri, 2020: 556).

Melalui keterampilan ini, perempuan pencari kerja tidak lagi memandang diri mereka tidak berdaya di ranah domestik, melainkan tumbuh menjadi pribadi yang berani meningkatkan potensi dirinya. Atas dasar perubahan pola pikir tersebut, tata rias pengantin kini tidak lagi dinilai sebelah mata, melainkan telah termasuk dalam bagian bidang jasa. Untuk saat ini, di tengah maraknya tren kecantikan yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat, bidang jasa ini terus mengalami peningkatan.

Pelatihan tata rias pengantin menjadi salah satu wadah untuk meningkatkan keterampilan perempuan, bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan proses pemberdayaan perempuan, melibatkan perempuan dalam pelatihan berbasis kompetensi melalui program yang diwadahi oleh Balai Latihan Kerja, memberi ruang partisipasi untuk perempuan. Balai Latihan Kerja merupakan wadah yang disediakan oleh pemerintah, program ini sebagai penggerak dalam memberdayakan masyarakat, bersifat praktis dan cepat (Bangga, 2022: 394).

Balai Latihan Kerja (BLK) ini di kelola oleh Menteri Tenaga Kerja RI yang bertujuan untuk menambahkan keterampilan bagi peserta pelatihan, berbasis kompetensi kerjaan (Budi, 2019: 70). BLK di kelola oleh pemerintan pusat maupun daerah, salah satu BLK yang ada di daerah terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di Painan. BLK ini dipilih karena merupakan lembaga pelatihan kerja pemerintah daerah yang aktif dalam meningkatkan keterampilan masyarakat, terkhususnya perempuan. Berdasarkan data BLK partisipasi perempuan dalam

pelatihan tata rias pengantin ini, dari data yang diperoleh peserta tahun 2023 berjumlah 16 orang, dan di tahun 2024 sebanyak 16 orang.

Peserta pada pelatihan ini diikuti oleh perempuan daerah Pesisir Selatan, di mana sebelum mengikuti pelatihan ini para peserta harus mengikuti alur pendaftaran dan mengikuti tes wawancara. Peserta pelatihan tata rias pengantin ini banyak diminati oleh para perempuan yang rata-rata berumur 18 hingga 25 tahun, dengan karakteristik didominasi oleh lulusan baru (fresh graduate) serta Ibu Rumah Tangga (IRT) muda. Alasan utama yang mendorong kelompok perempuan dan IRT muda ini antusias mengikuti pelatihan adalah adanya peluang ekonomi yang besar di sektor informal serta fleksibilitas waktu yang ditawarkan oleh profesi tata rias.

Melalui pemaparan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mendalami peranan BLK terhadap pemberdayaan perempuan melalui program pelatihan tata rias pengantin di Balai Latihan Kerja (BLK) Painan, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wadah untuk melakukan pelatihan berbasis kompetensi kerja, karena itu peneliti membahas permasalahan ini dengan mengambil judul penelitian “Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Tata Rias Pengantin Di Balai Latihan Kerja Painan”.

B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana pemberdayaan perempuan melalui program pelatihan tata rias pengantin oleh balai latihan kerja Painan.

2. Batasan masalah

Agar penelitian ini berjalan dengan fokus dan efisien, perlu adanya batasan masalah yang jelas. Batasan masalah ini berperan untuk memperjelas ruang lingkup kajian sehingga tidak keluar dari konteks yang telah ditetapkan, serta membantu peneliti dalam mengarahkan proses pengumpulan data dan analisis data. Pada penelitian ini batasan masalah ditetapkan berdasarkan teori pemberdayaan sebagai proses penguatan kapasitas. Adapun batasan masalah meliputi:

- a. Bagaimana tahapan pemberdayaan melalui sosialisasi kegiatan dan penyadaran masyarakat?
- b. Bagaimana tahapan pemberdayaan melalui pengorganisasian masyarakat?
- c. Bagaimana tahapan pemberdayaan melalui pelaksanaan kegiatan?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan secara sistematis, diperlukan perumusan tujuan penelitian yang menjadi pedoman penelitian, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tahapan pemberdayaan melalui sosialisasi kegiatan dan penyadaran masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tahapan pemberdayaan melalui pengorganisasian masyarakat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tahapan pemberdayaan melalui pelaksanaan kegiatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun bentuk manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, dan dapat digunakan sebagai pembandingan bagi penelitian selanjutnya, bentuk tanggung jawab akademik guna mendapatkan gelar sarjana sosial pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan bagi Balai Latihan Kerja (BLK) Painan dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas program pelatihan tata rias pengantin sebagai upaya pemberdayaan perempuan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana program dilaksanakan dan diterapkan dalam meningkatkan keterampilan serta kepercayaan diri perempuan melalui pelatihan tersebut sebagai upaya pemberdayaan perempuan.